

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung :Citra Aditya Bakti.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.Bandung :CV Alfabeta.
- Badan Administrasi Kepegawaian Negara. 1999. *Kebijakan Kepegawaian Negara dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca Pemilu*.Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta :Sinar Grafika
- Daeng Naja. 2010.*Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta : Pustaka yustisia
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyati. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konse pdan Aplikasinya di Indonesia*.Yogyakarta : Gava Media
- Indroharto. 2000. Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata UsahaNegara Buku I. *Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Kamal Hidjaz. 2010. *Efektifitas Penyelenggaran Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Makassar : Pustaka Refleksi
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Peter Salim dan Yeni Salim.2002.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: Modern English Press.
- Philipus M. Hadjhon. 1998. *Penataan Hukum Administrasi*. Surabaya : Fakultas Hukum Unair
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*. Laks Bang Pressindo : Bandung
- SF. Marbun. 1997.*Peradilan Adminitrasi Negara dan Upaya Adminitrasi di Indonesia*. Liberty : Yogyakarta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung

Tjahya Supriyatna.1996. *Administrasi Birokrasi dan Pelayanan Publik*.,Nimas Multian : Bandung.

Zainuddin, Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*.Jakarta : Sinar grafika

B. Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang – Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1995

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

C. Skripsi / Makalah

Asep Warlan Yusuf, “Wewenang Pemerintahan dalam Penataan Ruang (Suatu Model Pendekatan Sistem)”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 22.

Abdullah Syukur. 1987. “Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, *Makalah*, Persadi, Ujung Pandang

Kadar Slamet, “Perluasan Wewenang Mengadili Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintahan”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2013, hlm. 38

Retnami, Setya. “ Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia,” *Makalah* Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000.

D. Jurnal

Ahmad,Irdam,“Persebaran Penduduk Yang Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan.”*Jurnal Forum Geografi* vol. 25 no. 2 Desember 2011. Surakarta : UMS

Ali Hadi La Dimuru.“ Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa.”*Jurnal Sosial dan Politik Al – Qisthi*. Vol nomor II edisi Desember 2017

Ardelli Marselli, dkk, Upaya Penataan Dan Penertiban Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan Di Kabupaten Kendal Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, *Jurnal*, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, Minto Hadi, “ Iplementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang)”, *Jurnal*, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2014

Eet Saiful Hidayat,“Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kabupaten Garut,“ *Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh*,Garut, 2017

